

KATA PENGANTAR

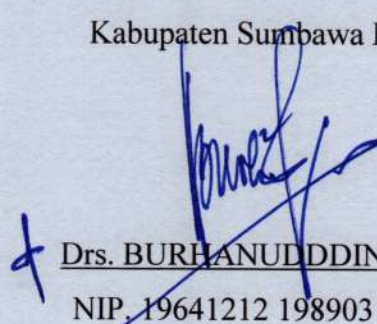
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan atau panduan kerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021–2026 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan - permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi Kabupaten Sumbawa Barat serta misi pembangunan.

Besar harapan kami bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat melalui program-program yang telah disusun.

Taliwang, 24 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumbawa Barat



Drs. BURHANUDDIN, M.M

NIP. 19641212 198903 1 028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama diberbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu pesat, mendorong berbagai kota di belahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang pada bidang industri Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju di Era Industri 4.0

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke-4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berdasarkan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (*M2M*) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things* (*IoT*) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Pemanfaatan dan perkembangan industri Teknologi Informasi Komunikasi dapat berperan sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

1. *Government to Citizen* (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki

hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

2. *Government to Business* (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Government* (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Komunikasi dan Informasi hadir untuk mewujudkan tersebut, Ada 3 (Tiga) bidang urusan yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: yang meliputi bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Hal tersebut menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, peraturan perundang undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 20 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan kebijakan dan program strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Pusat dan Daerah.
2. Mewujudkan Program dan Kegiatan Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 disusun untuk memberikan landasan Pemerintah dalam melakukan sinergi dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dimasyarakat secara responsif, sebagai upaya Pertanggungjawaban layanan publik yang profesional.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat;

1. Tercapainya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat serta menetapkan indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Tersedianya pedoman bagi seluruh Unit Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas pokok dan Fungsi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur organisasi

Sesuai dengan peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Struktur sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretaris Dinas

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
2. Memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
4. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
5. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
6. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dinas di bantu 2 (dua) Kasubbag :

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Rincian tugas kepala Subbagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja
5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya
6. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas
7. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
9. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas
10. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan

11. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional
13. Melaksanagn penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
16. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian
17. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
18. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Kasubbag Perencanaan

Rincian tugas Kasubbag koordinasi Perencanaan

1. Melaksnakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
2. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan
3. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan
4. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas
5. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas
6. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas
7. melaksanakan pengelolaan data dan informasi
8. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
10. Melaksanagn tugas-tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kasubbag Keuangan

Rincian tugas Kasubbag Keuangan

1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai
2. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan

3. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran
4. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksanagn tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika

Rincian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
2. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
3. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
4. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
5. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang komunikasi dan informatika
6. Mongkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kominfo dibantu 2 (dua) Kepala Seksi

a. Kepala Seksi Komunikasi

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi komunikasi
2. Menyusun bahan kebijakan teknis komunikasi publik
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis komunikasi publik
4. Merancang bahan kebijakan teknis komunikasi publik
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis komunikasi publik
6. Membuat konsep bahan kebijakan teknis komunikasi publik
7. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis komunikasi publik
8. Menganalisis bahan kebijakan teknis komunikasi publik
9. Menyelenggarakan pelayanan pos di pedesaan
10. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan pemberian izin serta menertibkan jasa titipan untuk kantor agen
11. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi
12. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi iizin penyelenggara telekomunikasi khusus keperluan pemerintah dan badan hukum serta usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dalam cakupan wilayah kabupaten

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Seksi Informatika

Rincian tugas kepala seksi informatika

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi informatika
2. Menyusun bahan kebijakan teknis informatika
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis informatika
4. Merancang bahan kebijakan teknis informatika
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis informatika
6. Melaksanakan desiminasi informasi nasional
7. Melaksanakan pengelolaan website pemerintah daerah
8. Melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi pengelolaan data elektronik
9. Mengembangkan layanan monitoring isu publik di media massa/media sosial
10. Mengembangkan kegiatan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah meliputi briefing notes, press release, dan backgrounders
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Rincian tugas kepala bidang statistik dan persandian

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
2. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
3. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
4. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
5. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang statistik dan persandian
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik dan persandian
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang statistik dan persandian dibantu 2 (dua) kepala seksi

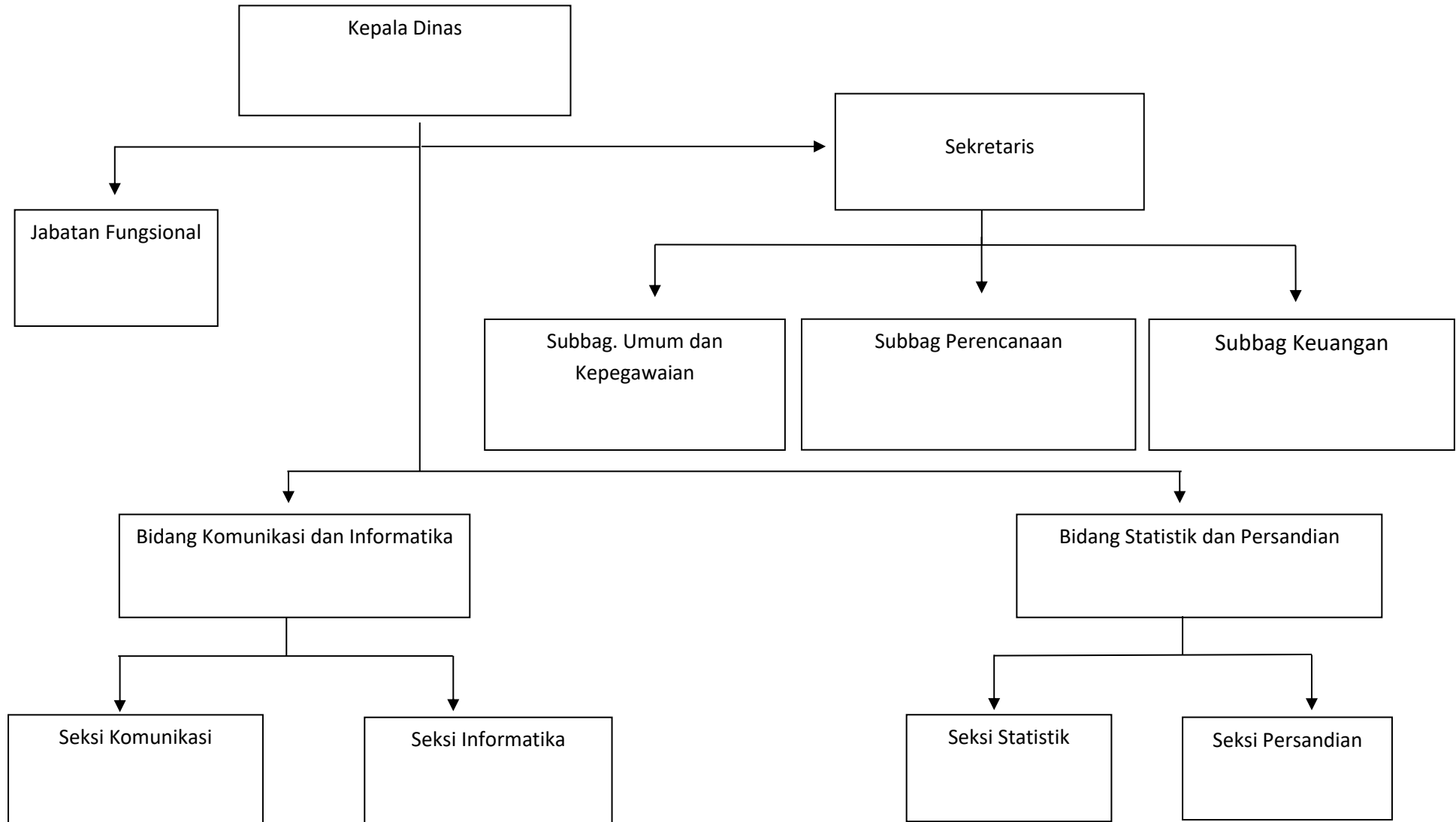
a. Kepala Seksi Statistik

Rincian tugas kepala seksi statistik

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi statistik
2. Menyusun bahan kebijakan teknis statistik
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis statistik
4. Merancang bahan kebijakan teknis statistik
5. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik

6. Melakukan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan data elektronik
 7. Menyelenggarakan komplikasi, integrasi dan penyajian data informasi
 8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala Seksi Persandian
- Rincian tugas kepala seksi persandian
1. Menyusun program dan rencana kerja seksi persandian
 2. Menyusun bahan kebijakan teknis persandian
 3. Merencanakan bahan kebijakan teknis persandian
 4. Merancang bahan kebijakan teknis persandian
 5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis persandian
 6. Menganalisis bahan kebijakan teknis persandian
 7. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pembinaan peralatan sandi, pembinaan sistem sandi, pembinaan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian
 8. Melaksanakan pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan perangkat daerah lainnya
 9. Melaksanakan penerapan dan pengkoordinasian pengembangan teknologi persandian
 10. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan peralatan sandi, system/kunci sandi dan material sandi
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat**



2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dukungan dan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi daya upaya untuk mengatasinya secara partisipatif dengan menempatkan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika sebagai subyek pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan Pembangunan. Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pembangunan daerah

merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tergambar dalam susunan kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	
1	2	3	4	5	6
1	Juru Muda, I/a	-	-	-	-
2	Juru Muda TK.I I/b	-	-	-	-
3	Juru, I/c	-	-	-	-
4	Juru Tk.I, I/c	-	-	-	-
5	Pengatur Muda II/a	-	-	-	-
6	Pengatur muda, TK.I, II/b	2	-	-	2
7	Pengatur, II/c	1	-	-	1
8	Pengatur TK.I, II/d	3	-	-	3
9	Penata muda, III/a	-	3	-	3
10	Penata Muda TK.I, III/b	2	-	-	1
11	Penata, III/c	1	-	-	1
12	Penata Tk. I, III/d	3	-	-	3
13	Pembina, IV/a	2	-	-	2

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	
14	Pembina Tk. I, IV/b	1	-	-	1
15	Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	-	1
16	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-	-
17	Pembina Utama, IV/e	-	-	-	-
	Jumlah	16	3	-	19

Sumber : Umum dan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	
1	SD	-	-	1	1
2	SMP	-	-	1	1
3	SMA	5	-	8	13
4	D1	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-
6	D3	1	-	2	3
7	D4	-	-	-	-
8	S1	7	3	10	20
9	S2	3	-	-	3
	Jumlah	16	3	22	41

Sumber : Umum dan Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

Dari Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa kebutuhan Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kuantitas kurang memadai. Jumlah pegawai yang ada di dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah 36 orang, dengan jumlah PNS 19 orang dan PTT 25 orang.

Tabel 2.3 Daftar Aset

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banyak	Jumlah Harga
I	2	3	4	5	6
1	Portable Generating Set	Pembelian	2017	1	24.000.000
2	Portable Generating Set	Hibah	2018	1	7.700.000
3	Station Wagon/Toyota Avanza	Pembelian	2010	1	148.000.000
4	Station Wagon/ Isuzu	Pembelian	2013	1	483.677.828
5	Sepeda Motor/ Honda WIN	Pembelian	2004	1	9.470.500
6	Sepeda Motor Suzuki	Pembelian	2006	1	9.700.000
7	Sepeda Motor Suzuki Thunder	Pembelian	2006	1	14.850.000
8	Sepeda Motor Supra	Pembelian	2008	1	12.750.000
9	Sepeda Motor Vario	Pembelian	2018	4	73.800.000
10	Global Positioning System	Pembelian	2014	1	5.000.000
11	Mesin Ketik	Pembelian	2018	1	3.000.000
12	Rak Besi/Metal	Pembelian	2016	1	23.400.000
13	Filling Besi/Metal	Hibah	2004	1	862.500
14	Filling Besi/Metal	Pembelian	2009	1	1.500.000
15	Filling Kayu	Pembelian	2011	1	2.466.564
16	Lemari Kayu	Pembelian	2018	5	20.000.000
17	Papan Visuil	Pembelian	2015	57	17.100.000
18	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	74.448.000
19	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	134.850.000
20	Papan Nama Instansi	Pembelian	2017	1	5.000.000

21	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	2.500.000
22	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	2.500.000
23	Papan Pengumuman	Pembelian	2018	1	49.500.000
24	Mesin Absensi	Pembelian	2017	1	3.915.140
25	Overhead Projektor/Infocus	Pembelian	2014	1	8.000.000
26	Overhead Projektor/View Sonic	Pembelian	2018	1	8.900.000
27	Overhead Projektor/Microvosion	Hibah	2018	1	15.585.500
28	Overhead Projektor/Nec M403HG	Hibah	2018	1	24.960.000
29	Rak Kayu	Pembelian	2008	1	2.975.000
30	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	2	12.000.000
31	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	7	21.000.000
32	Meja Kayu Rotan	Pembelian	2017	1	12.000.000
33	Kursi Lipat/Chitose	Pembelian	2009	6	1.800.000
34	Kursi Lipat	Pembelian	2013	5	1.625.000
35	Kursi Lipat Chitose	Pembelian	2018	50	24.500.000
36	Meja Biro	Pembelian	2009	3	4.490.001
37	Sofa/Kayu local	Pembelian	2009	1	3.000.000
38	Sofa	Pembelian	2018	2	20.000.000
39	Meublair Lainnya	Pembelian	2017	1	100.000.000
40	Mesin Potong Rumput	Pembelian	2018	1	6.000.000
41	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	10.000.000
42	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	10.000.000
43	AC Unit	Pembelian	2017	1	10.000.000

44	AC Unit	Pembelian	2017	1	10.000.000
45	AC Split	Pembelian	2009	1	3.500.000
46	AC Split	Pembelian	2016	2	10.400.000
47	AC Split/Jetcool	Pembelian	2017	1	5.000.000
48	Loudspeaker/Toa	Pembelian	2015	1	3.500.000
49	Loud Speaker/Proel EX-15P	Hibah	2018	4	17.600.000
50	Loudspeaker/Proel Calbe Connector	Hibah	2018	1	8.140.000
51	Sound System/Home Use	Pembelian	2018	1	14.500.000
52	Microphone/Ashley SMR-6	Hibah	2018	1	1.650.000
53	Microphone/Proel	Hibah	2018	1	1.980.000
54	Microphone Floor Stand	Hibah	2018	4	2.200.000
55	Tustel	Pembelian	2011	1	6.000.000
56	Tustel	Pembelian	2013	1	9.810.000
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2017	1	10.000.000
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2018	1	25.000.000
59	Internet	Pembelian	2018	1	1.777.947.000
60	P.C Unit/Acer	Pembelian	2014	1	9.800.000
61	P.C Unit/Asus	Pembelian	2018	2	20.000.000
62	P.C Unit/Lenovo	Pembelian	2018	1	19.800.000
63	Lap Top/Toshiba L40-AS101G Intel	Pembelian	2015	1	9.500.000
64	Laptop Toshiba	Pembelian	2015	1	8.160.000
65	Lap Top Asus	Pembelian	2016	2	50.000.000

66	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	10.000.000
67	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	10.000.000
68	Lap Top Asus	Pembelian	2017	3	53.400.000
69	Lap Top Asus	Pembelian	2017	1	19.900.000
70	Hard Disk	Pembelian	2016	1	4.000.000
71	Hard Disk	Pembelian	2018	2	4.000.000
72	Printer Canon	Pembelian	2018	5	20.000.000
73	Printer Epson	Pembelian	2018	1	4.500.000
74	Printer Epson LX 300	Pembelian	2018	1	4.000.000
75	Printer HP	Pembelian	2015	1	8.000.000
76	Printer Canon Pixma MP 237	Pembelian	2015	1	2.000.000
77	Printer Canon MP 237	Pembelian	2015	1	2.860.000
78	Printer LX 310	Pembelian	2015	1	3.500.000
79	Printer Canon Inkjet	Pembelian	2016	1	3.500.000
80	Printer Canon Pixma	Pembelian	2017	3	9.000.000
81	Peralatan Persomal Komputer	Pembelian	2016	1	16.900.000
82	Server HP	Pembelian	2016	1	26.000.000
83	Router	Pembelian	2014	1	1.000.000
84	Router	Pembelian	2015	10	40.000.000
85	Router	Pembelian	2016	3	2.730.000
86	Router	Pembelian	2016	3	19.500.000
87	Router	Pembelian	2016	10	6.500.000
88	Router	Pembelian	2016	1	7.800.000
89	Router	Pembelian	2016	1	23.400.000
90	Router	Pembelian	2016	1	12.350.000

91	Meja Kerja Pejabat	Pembelian	2012	2	6.000.000
	Eselon III				
92	Meja Kerja Pejabat	Pembelian	2010	1	1.500.000
	Lain-lain				
93	Meja Kerja Pejabat	Pembelian	2010	1	1.500.000
	Lai-lain				
94	Meja Rapat Pejabat	Pembelian	2007	6	7.479.000
	Lain-lain				
95	Meja Rapat Pejabat	Pembelian	2009	6	9.360.000
	Lain-lain				
96	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2013	1	2.500.000
	Eselon II				
97	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2017	1	4.000.000
	Eselon II/frontline				
98	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2006	1	1.250.000
	Eselon III/Olympic				
99	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2017	2	6.000.000
	Eselon III				
100	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2006	3	3.450.000
	Eselon IV/Olympic				
101	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2015	1	2.000.000
	Eselon IV				
102	Kursi Kerja Pejabat	Pembelian	2017	7	14.000.000
	Eselon IV				
103	Lemari Arsip untuk	Pembelian	2015	1	2.000.000
	arsip				
104	Camera + Attachment	Pembelian	2018	1	17.500.000
105	Camera + Attachment	Pembelian	2018	1	4.500.000
106	Audio Amplifier	Hibah	2018	1	5.500.000
107	Compact Disk Player	Hibah	2018	1	1.540.000
108	Unintemuptible Power	Pembelian	2018	1	58.500.000
	Supply				

109	Lensa Kamera	Pembelian	2013	1	8.500.000
110	Amplifier	Pembelian	2015	1	6.000.000
111	Microphone	Pembelian	2015	1	500.000
112	Switcher/menara antenna	Pembelian	2016	3	9.750.000
113	Switcher/menara antenna	Pembelian	2016	15	48.750.000
114	Audio Processor	Hibah	2018	1	7.700.000
115	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	177.440.000
116	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	208.030.000
117	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	90.750.000
118	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	183.250.000
119	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	138.400.000
120	Jaringan Telepon di Atas Tanah	Pembelian	2010	1	5.000.000
Total				327	4.798.802.033

2.2.2. Sumber Daya Aset

Aset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Aset Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

No	Spesifikasi Barang		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
I	2		3	4	5	6
1	Portable Set	Generating	Pembelian	2017	1	Baik
2	Portable Set	Generating	Hibah	2018	1	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
3	Station Wagon/Toyota Avanza	Pembelian	2010	1	Rusak Berat
4	Station Wagon/ Isuzu	Pembelian	2013	1	Rusak
5	Sepeda Motor/ Honda WIN	Pembelian	2004	1	Rusak
6	Sepeda Motor Suzuki	Pembelian	2006	1	Rusak
7	Sepeda Motor Suzuki Thunder	Pembelian	2006	1	Rusak
8	Sepeda Motor Supra	Pembelian	2008	1	Rusak
9	Sepeda Motor Vario	Pembelian	2018	4	Baik
10	Global Positioning System	Pembelian	2014	1	Baik
11	Mesin Ketik	Pembelian	2018	1	Baik
12	Rak Besi/Metal	Pembelian	2016	1	Baik
13	Filling Besi/Metal	Hibah	2004	1	Baik
14	Filling Besi/Metal	Pembelian	2009	1	Baik
15	Filling Kayu	Pembelian	2011	1	Baik
16	Lemari Kayu	Pembelian	2018	5	Baik
17	Papan Visuil	Pembelian	2015	57	Baik
18	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	Baik
19	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	Baik
20	Papan Nama Instansi	Pembelian	2017	1	Baik
21	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	Baik
22	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	Baik
23	Papan Pengumuman	Pembelian	2018	1	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
24	Mesin Absensi	Pembelian	2017	1	Baik
25	Overhead Projektor/Infocus	Pembelian	2014	1	Baik
26	Overhead Projektor/View Sonic	Pembelian	2018	1	Baik
27	Overhead Projektor/Microvosion	Hibah	2018	1	Baik
28	Overhead Projektor/Nec M403HG	Hibah	2018	1	Baik
29	Rak Kayu	Pembelian	2008	1	Baik
30	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	2	Baik
31	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	7	Baik
32	Meja Kayu Rotan	Pembelian	2017	1	Baik
33	Kursi Lipat/Chitose	Pembelian	2009	6	Baik
34	Kursi Lipat	Pembelian	2013	5	Baik
35	Kursi Lipat Chitose	Pembelian	2018	50	Baik
36	Meja Biro	Pembelian	2009	3	Baik
37	Sofa/Kayu local	Pembelian	2009	1	Baik
38	Sofa	Pembelian	2018	2	Baik
39	Meublair Lainnya	Pembelian	2017	1	Baik
40	Mesin Potong Rumput	Pembelian	2018	1	Baik
41	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	Baik
42	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	Baik
43	AC Unit	Pembelian	2017	1	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
44	AC Unit	Pembelian	2017	1	Baik
45	AC Split	Pembelian	2009	1	Baik
46	AC Split	Pembelian	2016	2	Baik
47	AC Split/Jetcool	Pembelian	2017	1	Baik
48	Loudspeaker/Toa	Pembelian	2015	1	Baik
49	Loud Speaker/Proel EX-15P	Hibah	2018	4	Baik
50	Loudspaeker/Proel Calbe Connector	Hibah	2018	1	Baik
51	Sound System/Home Use	Pembelian	2018	1	Baik
52	Microphone/Ashley SMR-6	Hibah	2018	1	Baik
53	Microphone/Proel	Hibah	2018	1	Baik
54	Microphone Floor Stand	Hibah	2018	4	Baik
55	Tustel	Pembelian	2011	1	Baik
56	Tustel	Pembelian	2013	1	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2017	1	Baik
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2018	1	Baik
59	Internet	Pembelian	2018	1	Baik
60	P.C Unit/Acer	Pembelian	2014	1	Baik
61	P.C Unit/Asus	Pembelian	2018	2	Baik
62	P.C Unit/Lenovo	Pembelian	2018	1	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
63	Lap Top/Toshiba L40-AS101G Intel	Pembelian	2015	1	Baik
64	Laptop Toshiba	Pembelian	2015	1	Baik
65	Lap Top Asus	Pembelian	2016	2	Baik
66	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	Baik
67	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	Baik
68	Lap Top Asus	Pembelian	2017	3	Baik
69	Lap Top Asus	Pembelian	2017	1	Baik
70	Hard Disk	Pembelian	2016	1	Baik
71	Hard Disk	Pembelian	2018	2	Baik
72	Printer Canon	Pembelian	2018	5	Baik
73	Printer Epson	Pembelian	2018	1	Baik
74	Printer Epson LX 300	Pembelian	2018	1	Baik
75	Printer HP	Pembelian	2015	1	Baik
76	Printer Canon Pixma MP 237	Pembelian	2015	1	Baik
77	Printer Canon MP 237	Pembelian	2015	1	Baik
78	Printer LX 310	Pembelian	2015	1	Baik
79	Printer Canon Inkjet	Pembelian	2016	1	Baik
80	Printer Canon Pixma	Pembelian	2017	3	Baik
81	Peralatan Persomal Komputer	Pembelian	2016	1	Baik
82	Server HP	Pembelian	2016	1	Baik
83	Router	Pembelian	2014	1	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
84	Router	Pembelian	2015	10	Baik
85	Router	Pembelian	2016	3	Baik
86	Router	Pembelian	2016	3	Baik
87	Router	Pembelian	2016	10	Baik
88	Router	Pembelian	2016	1	Baik
89	Router	Pembelian	2016	1	Baik
90	Router	Pembelian	2016	1	Baik
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2012	2	Baik
92	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Pembelian	2010	1	Baik
93	Meja Kerja Pejabat Lai-lain	Pembelian	2010	1	Baik
94	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Pembelian	2007	6	Baik
95	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Pembelian	2009	6	Baik
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Pembelian	2013	1	Baik
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/frontline	Pembelian	2017	1	Baik
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/olympic	Pembelian	2006	1	Baik
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	2	Baik
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/Olympic	Pembelian	2006	3	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
101	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2015	1	Baik
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	7	Baik
103	Lemari Arsip untuk arsip	Pembelian	2015	1	Baik
104	Camera + Attachment	Pembelian	2018	1	Baik
105	Camera + Attachment	Pembelian	2018	1	Baik
106	Audio Amplifier	Hibah	2018	1	Baik
107	Compact Disk Player	Hibah	2018	1	Baik
108	Unintemuptible Power Supply	Pembelian	2018	1	Baik
109	Lensa Kamera	Pembelian	2013	1	Baik
110	Amplifier	Pembelian	2015	1	Baik
111	Microphone	Pembelian	2015	1	Baik
112	Switcher/menara antenna	Pembelian	2016	3	Baik
113	Switcher/menara antenna	Pembelian	2016	15	Baik
114	Audio Processor	Hibah	2018	1	Baik
115	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	Baik
116	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	Baik
117	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	Baik
118	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	Baik

No	Spesifikasi Barang Nama/ Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembli an	Banya knya	Keadaan Barang
I	2	3	4	5	6
119	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	Baik
120	Jaringan Telepon di Atas Tanah	Pembelian	2010	1	Baik
	Total			327	4.798.802.033

Sumber : Umum dan Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi masalah komunikasi dan informatika. Adapun jenis pelayanan dasar tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Targe t 2018	Realisas i	Targe t 2019	Realisas i	Targe t 2020	Realisas i
1	Meningkat Efektivitas Pelayanan Kantor	Persentase Efektivitas Pelayanan Kantor	100%	92,73%	100%	83,37 %	100%	92,5%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas laporan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%	99,50%	100%	99,50 %	100%	65,7%
3	Meningkatnya	Persentase	100%	92,14%	100%	90,06 %	100%	74,5%

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2018	Realisasi	Target 2019	Realisasi	Target 2020	Realisasi
	a Kualitas Program Organisasi Perangkat Daerah	Kesesuaian Dokumen dengan RPJMD						
4	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data	100%	87,73%	100%	98,25 %	100%	88,3%
5	Meningkatnya Kualitas Aparatur pengaman Data	Persentase Aparatur Pengaman Data	100%	94,36%	100%	97,32 %	100%	91%
6	Meningkatnya Kelancaran Informasi Publik	Persentase Infrastruktur komunikasi	100%	93,39%	100%	71,26 %	100%	95,3%
7	Meningkatkan Infrastruktur Informatika	Persentase Infrastruktur Informatika	100%	99,71%	100%	63,81 %	100%	94,4%

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2019	Realisasi 2019	%	Target 2020	Realisasi 2020	%
1	Meningkat Efektivitas Pelayanan Kantor	Persentase Efektivitas Pelayanan Kantor	100%	90,06 %	90,06 %	100%	92,5%	92,5%
2	Meningkatnya Kualitas dan	Persentase Realisasi	100%	83,37 %	83,37 %	100%	65,7%	65,7%

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2019	Realisasi 2019	%	Target 2020	Realisasi 2020	%
	Kuantitas laporan ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Keuangan						
3	Meningkatnya Kualitas Program ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen dengan RPJMD	100%	99,50 %	99,50 %	100%	74,5%	74,5%
4	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data	100%	71,26 %	71,26 %	100%	88,3%	88,3%
5	Meningkatnya Kualitas Aparatur pengaman Data	Persentase Aparatur Pengaman Data	100%	63,81 %	63,81 %	100%	91%	91%
6	Meningkatnya Kelancaran Informasi Publik	Persentase Infrastruktur komunikasi	100%	98,25 %	98,25 %	100%	95,3%	95,3%
7	Meningkatkan Infrastruktur Informatika	Persentase Infrastruktur Informatika	100%	97,32 %	97,32 %	100%	94,4%	94,4%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat dan hasil telaahan terhadap RT RW, terdapat sinkronisasi antar dokumen perencanaan dari pusat hingga kabupaten / kota yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya Infrastruktur IT secara utuh dan menyeluruh untuk mendukung rencana pembangunan Daerah dalam pengembangan dan pengimplementasian Digitalisasi Kabupaten Sumbawa Barat
2. Belum terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa mendukung pengembangan dan pengimplementasian Digitalisasi Kabupaten Sumbawa Barat
3. Kebutuhan akan pusat data yang terpadu (Data Center) yang akan menunjang tujuan Digitalisasi Kabupaten Sumbawa Barat
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi Informasi yang masih tergolong rendah dan sikap proaktif masyarakat terhadap teknologi informasi yang belum optimal
5. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten / Pusat terhadap perwujudan SPBE dan *Smart City* .

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat masih mempunyai permasalahan antara lain :

1. Internal

- a) Masih kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh formasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak berbanding lurus dengan kebutuhan dinas.
- b) Belum tersedianya data dan informasi yang valid. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya data dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkup Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian dapat diolah menjadi informasi daerah.
- c) Kurang sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini karena disebabkan Diskominfo KSB adalah Organisasi Perangkat Daerah baru, sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.
- d) Masih terbatas kawasan hot spot internet publik
- e) Belum terpadunya pemanfaatan internet untuk pelayanan public
- f) Belum terpadunya pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan public
- g) Belum tersedianya data statistik sektoral daerah yang berkesinambungan
- h) Belum terpadunya penyusunan data statistik daerah

2. Eksternal

- a) Belum optimalnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam hal tatalaksana program dan kegiatan yang pada Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut dikarenakan selain urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat juga harus menjalankan urusan pemerintahan dibidang Statistik dan Persandian.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah “ *Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat Baik Berlandaskan Gotong Royong*”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KSB Baik adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akheratnya serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
2. Gotong royong yang dalam bahasa tau tana samawa “basiru” merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektivitas inilah yang menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotong royong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang sesuai dengan misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas teknologi komunikasi dan informasi
2. Meningkatnya kualitas data dan informasi

Sasaran dari pada tujuan meningkatnya aksesibilitas teknologi dan informasi adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi secara merata,
2. Tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas,
3. Tersedianya lembaga penyedia layanan yang profesional, dan
4. Tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh

Sasaran dari pada tujuan meningkatnya kualitas data dan informasi adalah :

1. Tersedianya data statistik yang berkualitas
2. Terwujudnya efektivitas pengolahan data
3. Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data

4. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengolah data
5. Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan

Table 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

No	Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik	Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik yang Belum Optimal	Belum terintegrasinya sistem informasi masing-masing OPD	Iklim digitalisasi yang sedang menjadi Tren

3.3. Telaahan Renstra Kementrerian / Lembaga dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Renstra Kemenkominfo Republik Indonesia

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.”*** Pada pelaksanaannya, pencapaian

visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.3.2 Telaahan Renstra Diskominfo Provinsi NTB

Adapun Visi dan Misi Pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagaimana gambar berikut ini adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”**.

Dalam Visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

1. Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional
2. Satu Komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan Visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Misi I “NTB TANGGUH DAN MANTAP”:

Melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan serta Konektivitas Wilayah.

Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI”:

Melalui Transformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi.

Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS”:

Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah.

Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI”:

Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI”:

Melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pertanian, Pariwisata dan Industrilisasi.

Misi 6 “ NTB AMAN DAN BERKAH”:

Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional sehingga dapat dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,bahwa salah satu kebijakan penataan runag adalah pengembangan system prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata. Salah satu strategi Pengembangan Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata adalah mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri atas :

1. Pengembangan jaringan mikro digital perkotaan di Sekongkang ke masing-masing :Aikangkung (13 km) dan Tatar (11 km), Seteluk-UPT tambak Sari sepanjang 7,5 km, Taliwang – Sampir sepanjang 4 km.
2. Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
3. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
4. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten;
5. Pemanfaatan secara bersama pada suatu tower BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama; dan
6. Pengembangan jaringan televisi dan radio ke seluruh pelosok pedesaan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar, baik pada sektor wisata, peternakan, pertanian maupun hasil laut. Namun seluruh potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terjadi karena belum memadainya infrastruktur pendukung dan masih rendahnya kualitas sebagian sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menjadi hambatan dan ancaman bagi kelangsungan pembangunan daerah. Sumber daya alam yang tersedia sudah seharusnya dikelola secara lebih profesional sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Isu –isu Strategis Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

No	Bidang	Masalah	Issue
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komunikasi dan Informatika	Belum meratanya sarana prasarana komunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat	Penyebaran informasi masih belum merata
2	Statistik dan Persandian	Belum tersedianya data untuk informasi / khusus daerah Belum maksimalnya pengamanan data	Ketersediaan data masih terbatas, pengamanan data masih belum maksimal
3	Sekretariat	Pelayanan internet dinas belum tertib dan lancar	Pelayanan administrasi perkantoran masih belum tertib dan lancar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terdapat didalam RPJMD 2021 - 2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat.

4.1.1 Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu OPD yang turut berperan dalam mendukung pencapaian misi 3 (Tiga) RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat. Tahun 2021 -2026 Yaitu “KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *Outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 - 2026 berdasarkan isu strategis yang ada sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
3. Meningkatnya kualitas data statistik dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa Barat

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	DIGITALISASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEBAGAI WADAH KONTEN YANG AKURAT BERBASIS GOTONG ROYONG		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	98	98	98	98	98	98
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	Indeks penerapan SPBE	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya kualitas data statistik dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Persentase Data Statistik Sektoral dalam Dokumen Perencanaan Daerah	68.51	74.59	82.87	96.69	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada dasarnya tidak terlepas dari **Visi** dan **Misi** Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat **“Terwujudnya KSB Baik Berlandaskan Gotong Royong ”**.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat disamping harus berlandaskan pada tugas pokok Dinas yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian hendaknya juga mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan guna tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat agar lebih efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam 5 (lima) tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabaran pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya KSB Baik berlandaskan Gotong Royong “

Misi 3 : KSB Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen rka-organisasi perangkat daerah dan perubahan rka-organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen penyusunan dpa-organisasi perangkat daerah dan perubahan dpa-organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan gaji dan tunjangan asn
			Meningkatkan kualitas dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen penatausahaan barang milik daerah pada organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
			Meningkatkan kualitas Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Meningkatkan kualitas Dokumen	Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan komponen instalasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	listrik/penerangan bangunan kantor
			Meningkatkan kualitas dokumen penatausahaan arsip dinamis pada organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		Meningkatkan kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Meningkatkan kualitas dokumen pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Meningkatkan kualitas dokumen pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Meningkatkan kualitas dokumen pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pengelolaan media komunikasi public
			Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan e-government Di	Meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
			Meningkatkan kualitas pengembangan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kualitas data statistik dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah
			Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas sdm pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
		Meningkatkan kualitas Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp. 3.846.890.407,-. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program – program pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penerimaan Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi inerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Cukup	3,846,891	Cukup	40,000	Cukup	4,100,000	Cukup	4,250,000	Cukup	4,500,000	Baik	4,600,000	Baik	4,600,000	DISKOMINFO	KSB
	MENINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH			Realisasi Anggaran		98	4,201,000	98	4,156,000	98	4,111,000	98	4,116,000	98	4,121,000	98	4,126,000	98	4,126,000	DISKOMINFO	KSB
				Nilai SAKIP		BB		BB		BB		A		A		A		A		DISKOMINFO	KSB

Tabel 6.1

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	DISK OMIN FO	K S B
																					DISK OMIN FO
	Terlaksan anya Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenta se Pemenu han dokume n penyusu nan dokume n perenca naan, pengang garan dan evaluasi kinerja perangk at daerah tepat waktu		5	141 .87 2.5 00	6	145. 000. 000, 00	6	146. 000. 000, 00	6	148 .00 0.0 00, 00	6	150. 000. 000, 00	6	152. 000. 000, 00	5	141.8 72.50 0	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangka				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan dan		5	141 .87 2.5 00	6	145. 000. 000, 00	6	146. 000. 000, 00	6	148 .00 0.0 00, 00	6	150. 000. 000, 00	6	152. 000. 000, 00	5	7.195. 000

Tabel 6.1

	t Daerah			Kinerja Perangk at Daerah yang disusun								00									
	Terlaksan any a Koordinas i dan Penyusun an Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokume n RKA-SKPD yang disusun		5	7.1 95. 000	6	8.00 0.00 0,00	7	8.50 0.00 0,00	7	8.7 00. 000 ,00	7	9.00 0.00 0,00	7	9.20 0.00 0,00	4	7.149. 000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan any a Koordinas i dan Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokume n Perubah an RKA-SKPD yang disusun		4	7.1 49. 000	5	8.00 0.00 0,00	5	8.20 0.00 0,00	6	8.3 00. 000 ,00	7	8.50 0.00 0,00	7	8.80 0.00 0,00	5	2.711. 000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan any a Koordinas i dan Penyusun an DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokume n DPA - SKPD yang disusun		5	2.7 11. 000	6	3.00 0.00 0,00	6	3.20 0.00 0,00	6	3.3 00. 000 ,00	6	3.50 0.00 0,00	7	3.60 0.00 0,00	10	2.651. 000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan any a Koordinas i dan Penyusun an Perubaha		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokume n Perubah an DPA-		10	2.6 51. 000	7	3.00 0.00 0,00	7	3.20 0.00 0,00	7	3.5 00. 000	7	3.70 0.00 0,00	8	4.00 0.00 0,00	5	49.37 7.500	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	n DPA-SKPD			SKPD yang disusun																
	Terlaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monev Kinerja SKPD	5	49.377.500	7	50.000.000,00	8	53.000.000,00	8	55.000.000,00	8	55.300.000,00	8	555.000.000,00	141.872.500	6	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	5	141.872.500	6	145.000.000,00	6	146.000.000,00	6	148.000.000,00	6	150.000.000,00	6	152.000.000,00	22.119.000	6	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	5	22.160.000,00	5	22.180.000,00	6	22.500.000,00	6	23.000.000,00	6	23.100.000,00	6	23.100.000,00	22.160.000	5	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	Terlaksan aya Pelaksan aan Penataus ahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuanga n SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikas i Keuanga n SKPD		5	22. 119 .00 0	6	23.0 00.0 00,0 0	6	23.1 00.0 00,0 0	6	23. 200 .00 0,0 0	6	23.3 00.0 00,0 0	6	23.5 00.0 00,0 0	6. 46 4. 75 0	2	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Koordinas i dan Pelaksan aan Akuntansi SKPD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksan aan Akuntan si SKPD		5	22. 160 .00 0	5	22.1 80.0 00,0 0	6	22.5 00.0 00,0 0	6	23. 000 .00 0,0 0	6	23.1 00.0 00,0 0	6	23.2 00.0 00,0 0	2. 03 0. 00 0	17	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun		2	6.4 64. 750	2	6.50 0.00 0,00	2	7.00 0.00 0,00	3	7.2 50. 000 ,00	3	7.30 0.00 0,00	4	7.50 0.00 0,00	1	6,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan annya Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan		15	2.0 30. 000	17	2.60 0.00 0,00	20	3.00 0.00 0,00	22	3.2 00. 000 ,00	22	3.30 0.00 0,00	25	2.50 0.00 0,00	15	2.030. 000	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu		5	17.335.000,00	7	20.000,00	10	23.000,00	12	24.000,00	14	26.000,00	16	28.000,00	100	35,000	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		5	10.000,00	7	13.000,00	10	15.000,00	13	18.000,00	15	20.000,00	17	23.000,00	4	35,000	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		50	15.000,00	52	17.000,00	54	20.000,00	56	22.000,00	58	24.000,00	60	26.000,00	100	120,000	DISKOMINFO	KSB

Tabel 6.1

	Terlaksan anya Pendataa n dan Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelol aan Adminis trasi Kepega waian	3	10. 000 .00 0	4	12.0 00.0 00,0 0	5	15.0 00.0 00,0 0	6	17. 000 .00 0,0 0	7	18.0 00.0 00,0 0	8	20.0 00.0 00,0 0	4	20,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undanga n		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Bimbing an Teknis	3	10. 000 .00 0	4	12.0 00.0 00,0 0	5	15.0 00.0 00,0 0	6	17. 000 .00 0,0 0	7	18.0 00.0 00,0 0	8	20.0 00.0 00,0 0	5	100,00 0	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaks nanya Administ rasi Umum Perangka t Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenta se Pemenu han Kebutuh an Umum Perangk at Daerah	10 0	10. 000 .00 0	10 0	12.0 00.0 00,0 0	10 0	15.0 00.0 00,0 0	10 0	17. 000 .00 0,0 0	10 0	18.0 00.0 00,0 0	10 0	20.0 00.0 00,0 0	10 0	50,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Persenta se Pemenu han Kebutuh an Umum Perangk at	2	5.0 00. 000	5	7.00 0.00 0,00	7	10.0 00.0 00,0 0	10	12. 000 .00 0,0 0	12	14.0 00.0 00,0 0	14	15.0 00.0 00,0 0	10	20,000	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

				Daerah																	
	Terlaqksa nanya Penata usahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penataus ahaan Arsip Dinamis SKPD			50	5.00 0.00 0,00	60	7.00 0.00 0,00	70	10. 000 .00 0,0 0	80	12.0 00.0 00,0 0	90	15.0 00.0 00,0 0	4	30,000	DISK OMIN FO	K S B	
	Terlaks nanya Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persenta se Barang Milik Daerah yang dipenuhi	2	20. 000 .00 0	3	22.0 00.0 00,0 0	4	25.0 00.0 00,0 0	5	27. 000 .00 0,0 0	6	30.0 00.0 00,0 0	7	31.0 00.0 00,0 0	10 0	300,00 0	DISK OMIN FO	K S B	
	Terlaksan anya Pengada an Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendara an Dinas Jabatan yang diadaka n	1	20. 000 .00 0	2	22.0 00.0 00,0 0	3	24.0 00.0 00,0 0	4	25. 000 .00 0,0 0	5	27.0 00.0 00,0 0	6	28.0 00.0 00,0 0	2	100,00 0	DISK OMIN FO	K S B	
	Terlaksan anya Pengada an Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor	5	100, 000	5	100, 000	5	100, 000	5	100, 000	5	100, 000	5	100, 000	5	100,00 0	DISK OMIN FO	K S B	

Tabel 6.1

	Banguna n Lainnya			atau Banguna n yang diadaka n																	
	Terlaksan anya Pengada an Sarana dan Prasaran a Pendukun g Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n yang diadakan		5	30. 000 .00 0	6	35.0 00.0 00,0 0	7	40.0 00.0 00,0 0	8	41. 000 .00 0,0 0	9	45.0 00.0 00,0 0	10	50.0 00.0 00,0 0	3	100,00 0	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n yang diadakan		5	30. 000 .00 0	6	35.0 00.0 00,0 0	7	40.0 00.0 00,0 0	8	41. 000 .00 0,0 0	9	45.0 00.0 00,0 0	10	50.0 00.0 00,0 0	10 0	615,00 0	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan nya Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang disediaka n		5	30. 000 .00 0	6	35.0 00.0 00,0 0	7	40.0 00.0 00,0 0	8	41. 000 .00 0,0 0	9	45.0 00.0 00,0 0	10	50.0 00.0 00,0 0	2	15,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Penyedia		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administr		5	30.	6	35.0	7	40.0	8	41.	9	45.0	10	50.0	35	600,00	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	an Jasa Pelayana n Umum Kantor			asi Pelayana n Umum Kantor		000 .00 0		00.0 00,0 0		00.0 00,0 0		000 .00 0,0 0		00.0 00,0 0		00.0 00,0 0		0			
	Terlaksana nya Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenta se Barang Milik Daerah yang dipelihara	5	30. 000 .00 0	6	35.0 00.0 00,0 0	7	40.0 00.0 00,0 0	8	41. 000 .00 0,0 0	9	45.0 00.0 00,0 0	10	50.0 00.0 00,0 0	10 0	185,00 0	DISK OMIN FO	K S B	
	Terlaksan anya Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraa n Dinas dan Jabatan yang dipelihara	5	30. 000 .00 0	6	35.0 00.0 00,0 0	7	40.0 00.0 00,0 0	8	41. 000 .00 0,0 0	9	45.0 00.0 00,0 0	10	50.0 00.0 00,0 0	22	500,00 0	DISK OMIN FO	K S B	
	Terlaksan anya Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal yang dipelihara	5	30. 000 .00 0	6	35.0 00.0 00,0 0	7	40.0 00.0 00,0 0	8	41. 000 .00 0,0 0	9	45.0 00.0 00,0 0	10	50.0 00.0 00,0 0	1	5,000	DISK OMIN FO	K S B	

Tabel 6.1

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5	30.000.000	6	35.000.000	7	40.000.000	8	41.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000	1	100,000	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor yang dipelihara	100	10.587.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	10.587.000	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	100	10.587.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	10.587.000	DISKOMINFO	KSB

Tabel 6.1

Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik			Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik																DISK OMIN FO	K S B
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi dan komunikasi Public		A	223,768	A	225,000	A	250,000.00	A	300,000	A	320,000.00	A	350,000	A	350,000	DISK OMIN FO	K S B
Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPID OPD yang aktif		12	223,768	13	225,000	14	250,000	15	300,000	17	320,000	20	350,000	20	350,000	DISK OMIN FO	K S B
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama Media dalam Rangka Penyebaran Informasi Publik		100	141,494	100	120,000.00	100	125,000	100	130,000	100	135,000	100	140,000	100	140,000	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Hotspot Publik	10	50,000	12	55,000.00	15	60,000	17	6,500	18	67,000	20	70,000	20	70,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	10	82,274	12	100,000.00	14	150,000.00	16	160,000	18	200,000	20	250,000	20	250,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan E-GOV yang baik	50	600,000	Cukup	700,000	Baik	750,000	Baik	800,000	Baik	850,000	Sangat Baik	1,000,000	Sangat Baik	1,000,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	2	600,000	2	700,000	2	750,000	2	800,000	2	850,000	2	1,000,000	2	1,000,000	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																				
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan TIK		1	100,000	2	200,000	2	200,000	2	300,000	2	300,000	2	300,000	2	300,000	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		100.00	562,324	100.00	6,000,561	100.00	638,563	100.00	657,919	100.00	713,211	100.00	77,454	100.00	77,454	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang dikelola		68.51	562,324	74.59	6,000,561	82.87	638,563	96.69	657,919	100	713,211	100	77,454	100	774,532	DISKOMINFO	KSB

Tabel 6.1

	Daerah Kabupat en/ Kota Daerah Kabupat en/Kota																				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data set yang terkumpul, terkelola, teranalisis dan terdesiminasi		124	77,324	135	850,561	150	93,563	175	102,919	181	113,211	181	124,532	181	124,532	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah OPD yang terotorisasi		15	77,324	20	200,000	33	200,000	33	20,000	33	200,000	33	200,000	33	200,000	DISKOMINFO	KSB
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi		Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Aparatur yang terlatih dibidang Statistik		34	120,000	34	120,000	34	120,000	33	100,000	33	100,000	33	100,000	33	100,000	DISKOMINFO	KSB

Tabel 6.1

	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Daerah (Indeks kami)		15	365,000	20	395,000	30	425,000	40	455,000	50	500,000	60	550,000	60	550,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah dilakukan identifikasi keamanan Informasi		10	325,000	20	340,000	25	360,000	30	380,000	40	415,000	50	450,000	50	450,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik pemerintahan daerah yang diaudit		3	250,000	3	275,000	3	300,000	3	325,000	3	350,000	3	375,000	3	375,000	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksananya Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	jumlah ketersediaan Sumber daya keamanan informasi		2	150,000	2	200,000	2	225,000	2	250,000	2	300,000	2	325,000	2	325,000	DISK OMIN FO	K S B

Tabel 6.1

	an Sumber Daya Keamana n Informasi Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota		Daerah Kabupaten/Kota	yang disediaka n dan dikelola																	
	Terlaksan anya Hubunga n Komunika si Sandi Antar Perangka t Daerah Kabupate n/Kota		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persenta se titik dalam pola hubungan komunika si sandi yang teramank an		36	40,0 00	40	55,0 00	53	65,0 00	67	75,0 00	80	85,0 00	93	10,0 00	93	100,00 0	DISK OMIN FO	K S B
	Terlaksan anya Operasio nalisasi Jaring Komunika si Sandi Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah titik pola hubungan komunika si sandi teramank an		25	40,0 00	30	55,0 00	40	65,0 00	50	75,0 00	60	85,0 00	70	100, 000	70	100,00 0	DISK OMIN FO	K S B

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021- 2026 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel VII.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. dan sasaran RPJMD 2021- 2026 Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Realisasi Anggaran		98	98	98	98	98	98	98
2	Nilai SAKIP		BB	BB	BB	A	A	A	A
3	Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik		100	100	100	100	100	100	100
4	Peresentase Data Statistik Sektoral dalam Dokumen Perencanaan Daerah		68.51	74.59	82.87	96.69	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026 ini berpedoman pada PRJMD Kabupaten Sumbawa Barat yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman penyusunan Renstra yang akan datang Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan. Dengan disusunnya rencana strategis tahun 2021-2026 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target, Sasaran dan dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus juga bisa mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumbawa Barat.